

Peran Multitrack Diplomacy dalam Menangani Krisis Rohingya di Asia Tenggara: Studi Kasus Diplomasi ASEAN dan Organisasi Kemanusiaan

Rehan Iqstifani¹, Roza Andriani²

^{1,2} Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Abdurrahb Pekanbaru

*Penulis Korespondensi: Iqstifanijihan@gmail.com

Abstract. *The Rohingya crisis is one of the biggest humanitarian issues in Southeast Asia, marked by a wave of refugees due to violence, discrimination, and military operations in Myanmar. This study aims to analyze the dynamics of the Rohingya crisis in Southeast Asia, the implementation of multitrack diplomacy, and the effectiveness of this approach in addressing the Rohingya humanitarian crisis. The research uses a qualitative method with a case study approach through literature review and document analysis. The results show that the Rohingya crisis has triggered a large refugee flow to Bangladesh, Malaysia, Indonesia, and Thailand and has had social, political, and security impacts in the region. The implementation of multitrack diplomacy involves various actors through nine diplomatic channels, ranging from governments, international organizations, NGOs, the media, the business sector, to religious and educational leaders. This approach has succeeded in raising international attention, strengthening humanitarian assistance, and fostering international solidarity with the Rohingya. However, its effectiveness is still hampered by the ASEAN principle of non-intervention, limited access to conflict areas, global geopolitical factors, limited funding, and the lack of security guarantees for the refugee repatriation process. Therefore, stronger coordination between actors and greater political commitment from regional countries and the international community are needed to resolve the Rohingya crisis more effectively and sustainably.*

Keywords: *Rohingya, multitrack diplomacy, humanitarian crisis, ASEAN, refugees*

Abstrak. Krisis Rohingya merupakan salah satu permasalahan kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara yang ditandai dengan gelombang pengungsian akibat kekerasan, diskriminasi, dan operasi militer di Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika krisis Rohingya di Asia Tenggara, implementasi *multitrack diplomacy*, serta efektivitas pendekatan tersebut dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis Rohingya telah memicu arus pengungsian besar menuju Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand serta menimbulkan dampak sosial, politik, dan keamanan di kawasan. Implementasi *multitrack diplomacy* melibatkan berbagai aktor melalui sembilan jalur diplomasi, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, LSM, media, sektor bisnis, hingga tokoh agama dan pendidikan. Pendekatan ini berhasil meningkatkan perhatian internasional, memperkuat bantuan kemanusiaan, dan mendorong solidaritas masyarakat internasional terhadap Rohingya. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh prinsip non-intervensi ASEAN, keterbatasan akses ke wilayah konflik, faktor geopolitik global, keterbatasan pendanaan, serta belum adanya jaminan keamanan bagi proses repatriasi pengungsi. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antar-aktor serta komitmen politik yang lebih besar dari negara-negara kawasan dan komunitas internasional agar penyelesaian krisis Rohingya dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Rohingya, multitrack diplomacy, krisis kemanusiaan, ASEAN, pengungsi

1. LATAR BELAKANG

Krisis etnis Rohingya bukanlah peristiwa instan, melainkan puncak dari akumulasi diskriminasi struktural dan kekerasan berkepanjangan yang dilakukan oleh negara Myanmar, khususnya militer (Tatmadaw), terhadap komunitas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal meskipun telah menetap selama beberapa generasi, sehingga ditolak kewarganegaraannya, dibatasi

aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bergerak, serta menjadi sasaran operasi pembersihan etnis yang meliputi pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa. Dampak dari krisis sistemik ini meluber luas ke seluruh kawasan Asia Tenggara, tidak hanya dalam bentuk ancaman terhadap stabilitas keamanan regional, tetapi juga beban ekonomi dan kemanusiaan yang berat karena negara-negara tetangga harus menampung lonjakan pengungsi yang terus menerus.

Akibat kekerasan yang tak kunjung reda, sekitar satu juta lebih etnis Rohingya melarikan diri ke berbagai negara. Bangladesh menjadi tujuan utama dengan kepadatan luar biasa di kamp pengungsian Cox's Bazar yang dianggap sebagai kamp pengungsi terbesar di dunia. Sementara itu, Malaysia dan Indonesia menerima ribuan pengungsi yang tiba melalui jalur laut yang berbahaya, seringkali ditolak atau terombang-ambing di perairan regional akibat kebijakan push-back di beberapa negara seperti Thailand. Lonjakan ini memicu ketegangan sosial di negara penerima, membebani sumber daya lokal yang terbatas, dan menimbulkan dilema kemanusiaan karena tidak ada negara yang berkewajiban hukum secara langsung untuk menampung mereka di bawah kerangka ASEAN.

Tantangan terbesar dalam penyelesaian krisis ini justru berasal dari keterbatasan diplomasi tradisional yang dianut ASEAN. Mekanisme ASEAN Way yang berbasis pada prinsip non-intervensi (tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota) dan konsensus (keputusan harus disepakati semua anggota) menjadi bumerang. Karena Myanmar menganggap krisis Rohingya sebagai urusan internalnya, ASEAN tidak dapat memberikan sanksi atau tekanan berarti. Tidak ada mekanisme pengadilan HAM yang mengikat di ASEAN, dan upaya diplomatik seperti laporan maupun pernyataan keprihatinan seringkali diabaikan karena tidak memiliki konsekuensi nyata. Akibatnya, respons ASEAN terhadap krisis yang telah berlangsung hampir satu dekade ini dinilai lemah, lambat, dan tidak efektif karena hanya mengandalkan jalur pemerintah ke pemerintah (Track I) yang terhalang oleh politik kedaulatan.

Kondisi inilah yang membuat pendekatan multitrack diplomacy menjadi sangat krusial sebagai alternatif. Tidak seperti diplomasi tunggal, pendekatan ini membuka saluran komunikasi dan tekanan dari berbagai lapisan secara simultan. Pada Track I, tetap berjalan diplomasi resmi melalui PBB dan ASEAN, tetapi juga melibatkan negara-negara eksternal seperti China (yang memiliki pengaruh di Myanmar) dan negara-negara Barat melalui sanksi ekonomi. Pada Track II, akademisi, peneliti, dan think tanks dari universitas-universitas regional berperan mengadakan dialog informal yang tidak terikat kebijakan pemerintah untuk mencari solusi akar masalah. Pada Track III, organisasi masyarakat madani seperti Komisi HAM ASEAN (AICHR) sayangnya tidak independen, sehingga peran justru diambil alih oleh LSM internasional seperti Human Rights Watch dan jaringan komunitas lokal di Rakhine yang melakukan advokasi serta pendokumentasian pelanggaran HAM secara faktual. Sementara pada Track IV, diplomasi bisnis melibatkan perusahaan global yang berinvestasi di Myanmar untuk memberikan insentif atau disinsentif ekonomi, misalnya dengan menekan Myanmar agar menghentikan kekerasan jika ingin mempertahankan akses pasar dan bantuan pembangunan. Dengan menggabungkan keempat jalur ini, multitrack diplomacy mampu menembus tembok kedaulatan yang selama ini melindungi Myanmar, memberikan tekanan yang tidak hanya bersifat politik tetapi juga sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mendorong penyelesaian konflik kemanusiaan yang berlarut-larut ini.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis secara mendalam penerapan multitrack diplomacy dalam krisis Rohingya, termasuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di setiap jalur diplomasi, mekanisme kerja sama yang dibangun, serta sejauh mana pendekatan ini mampu mengatasi keterbatasan diplomasi tradisional dalam mendorong penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. Kedua, untuk mengkaji peran ASEAN dan organisasi kemanusiaan dalam penanganan pengungsi Rohingya, yang mencakup evaluasi terhadap kebijakan, program, dan aksi nyata yang telah dilakukan oleh ASEAN melalui berbagai mekanismenya (seperti AHA Centre, AICHR, dan pertemuan-pertemuan regional) serta oleh organisasi kemanusiaan (seperti UNHCR, IOM, dan berbagai LSM lokal) dalam memberikan bantuan kemanusiaan, perlindungan, advokasi, serta upaya pencarian solusi jangka panjang bagi para pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Multitrack Diplomacy

Multitrack diplomacy pertama kali diperkenalkan oleh Louise Diamond dan John Marks pada tahun 1992 melalui publikasi mereka yang berjudul *Multitrack Diplomacy: A Systems Approach to Peace*. Konsep ini lahir dari kritik terhadap diplomasi tradisional (single-track diplomacy) yang hanya mengandalkan interaksi antar-pemerintah dan dinilai terlalu lambat, kaku, dan tidak mampu menjangkau akar-akar konflik yang bersifat sosial-budaya (Diamond & Marks, 1992). Dalam definisinya, Diamond dan Marks menjelaskan bahwa multitrack diplomacy adalah suatu pendekatan sistemik terhadap perdamaian yang melibatkan berbagai jalur (tracks) yang bekerja secara simultan dan saling memperkuat, bukan secara berurutan atau terpisah. Montville (2006,) memperkuat definisi ini dengan menyatakan bahwa multitrack diplomacy merupakan "sistem paralel dan saling melengkapi dari berbagai upaya perdamaian yang melibatkan aktor dari level elit hingga level akar rumput (grassroots), dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi rekonsiliasi dan perdamaian jangka panjang." Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berorientasi pada hasil negosiasi formal, pendekatan ini menekankan pentingnya transformasi hubungan, pembangunan kepercayaan (trust-building), dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai fondasi perdamaian yang berkelanjutan (Lederach, 1997).

Multitrack diplomacy sering dikaitkan dengan konsep conflict transformation yang dikembangkan oleh John Paul Lederach. Lederach berargumentasi bahwa konflik berkepanjangan seperti krisis etnis tidak dapat diselesaikan hanya melalui negosiasi tingkat tinggi, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai jenjang kepemimpinan mulai dari pemimpin politik (level atas), pemimpin masyarakat madani dan akademisi (level menengah), hingga tokoh masyarakat lokal dan agama (level akar rumput). Ketiga level ini harus bekerja secara terintegrasi dalam sebuah sistem yang disebutnya sebagai peacebuilding infrastructure (Lederach, 1997). Untuk memahami signifikansi multitrack diplomacy, penting untuk membedakannya secara tegas dengan diplomasi tradisional. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

Pertama, dari segi aktor yang terlibat. Diplomasi tradisional hanya melibatkan aktor negara (state actors) yaitu pemerintah, kementerian luar negeri, dan diplomat. Sebaliknya, multitrack diplomacy melibatkan spektrum aktor yang jauh lebih luas, termasuk aktor non-negara seperti LSM, akademisi, pemimpin agama, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil (Dinstein, 2016).

Kedua, dari segi metode dan pendekatan. Diplomasi tradisional bersifat formal, hierarkis, dan mengikuti protokol diplomatik yang kaku. Komunikasi dilakukan melalui saluran resmi, notifikasi diplomatik, dan pertemuan tingkat tinggi yang terstruktur. Multitrack diplomacy, sebaliknya, lebih fleksibel, informal, dan adaptif. Ia dapat beroperasi melalui back-channels, dialog non-resmi, workshop pemecahan masalah, serta interaksi langsung antar-komunitas (Paffenholz, 2009).

Ketiga, dari segi cakupan tujuan. Diplomasi tradisional berfokus pada pencapaian kesepakatan formalseperti gencatan senjata, perjanjian damai, atau resolusi PBB—yang bersifat mengikat secara hukum. Tujuan utamanya adalah mengakhiri kekerasan dan menstabilkan hubungan antar-negara. Sementara itu, multitrack diplomacy memiliki cakupan yang lebih luas dan jangka panjang, meliputi tidak hanya penghentian konflik, tetapi juga rekonsiliasi, pembangunan kepercayaan (trust-building), transformasi hubungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk merawat perdamaian secara mandiri (Lederach, 1997).

Keempat, dari segi kapasitas preventif. Diplomasi tradisional cenderung reaktif: ia bergerak setelah konflik meledak menjadi kekerasan terbuka. Sebaliknya, multitrack diplomacy memiliki kapasitas yang lebih baik untuk deteksi dini dan pencegahan konflik (conflict prevention) karena jaringan informasinya yang luas hingga ke tingkat komunitas. Aktor-aktor Track 3 (LSM grassroots) sering kali menjadi "sensor awal" yang mendeteksi ketegangan jauh sebelum mencapai tingkat nasional (Busumtwi-Sam, 2002).

Kelima, dari segi legitimasi dan akuntabilitas. Diplomasi tradisional memiliki legitimasi formal karena mewakili kedaulatan negara, namun akuntabilitasnya terbatas pada proses politik domestik. Multitrack diplomacy memiliki legitimasi yang berbeda legitimasi moral, profesional, dan sosial yang sering kali justru lebih kuat di mata masyarakat sipil dan korban konflik. Namun, kelemahannya adalah kurangnya otoritas untuk mengikat para pihak dalam kesepakatan formal (Montville, 2006).

Krisis Rohingya: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampak

Akar historis konflik Rohingya dapat ditelusuri hingga periode kolonial Inggris di Burma (sekarang Myanmar). Setelah Perang Inggris-Burma pertama (1824-1826), wilayah Arakan (sekarang Negara Bagian Rakhine) dianeksasi oleh Inggris dan dijadikan bagian dari British India. Kebijakan kolonial Inggris membuka pintu imigrasi besar-besaran dari wilayah yang sekarang menjadi Bangladesh dan India Timur untuk bekerja di perkebunan dan sektor pertanian. Akibatnya, populasi Muslim di Arakan meningkat secara signifikan, yang kemudian menimbulkan ketegangan dengan penduduk asli Buddha Rakhine (Smith, 2012). Setelah kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, pemerintahan sipil pertama yang dipimpin oleh U Nu memberikan pengakuan kewarganegaraan yang relatif inklusif. Namun, kondisi berubah drastis setelah kudeta militer tahun 1962 oleh Jenderal Ne Win. Pemerintah militer yang baru menerapkan kebijakan nasionalisme Burma (Bamar) yang eksklusif, disertai dengan nasionalisasi ekonomi dan pembatasan ketat terhadap hak-hak minoritas. Bagi Rohingya, periode ini menandai awal dari diskriminasi sistematis yang terlembaga (Charney, 2009). Puncak awal kekerasan besar terjadi pada tahun 1978, ketika militer meluncurkan Operasi Raja Naga (Operation King Dragon) yang mengakibatkan sekitar 250.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Operasi ini secara resmi disebut sebagai "pemeriksaan penduduk" tetapi faktanya meliputi pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penghancuran masjid-masjid. Laporan dari United Nations dan Human Rights Watch pada masa itu sudah mendokumentasikan praktik-praktik yang kemudian disebut sebagai clearance operations (UNCU, 1993).

Gelombang kekerasan berikutnya terjadi secara periodik: tahun 1991-1992 (sekitar 270.000 pengungsi), tahun 2001-2002, dan tahun 2012 yang dipicu oleh kekerasan komunal antara komunitas Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya. Namun, krisis paling brutal dan terdokumentasi terjadi pada tahun 2016-2017. Pada 25 Agustus 2017, setelah serangan terhadap pos-pos polisi dan militer oleh kelompok bersenjata Rohingya yang disebut Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), militer Myanmar meluncurkan clearance operations yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebagai "contoh teksbook pembersihan etnis" (UN Human Rights Council, 2018, p. 6). Dalam waktu tiga bulan, lebih dari 740.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, bergabung dengan sekitar 300.000 yang sudah ada sebelumnya, sehingga total pengungsi Rohingya di Cox's Bazar melebihi satu juta jiwa.

Pada November 2019, Gambia, mewakili Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengajukan kasus genosida terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah darurat yang meminta Myanmar untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap tindakan genosida. Meskipun demikian, implementasi perintah tersebut di lapangan tetap lemah karena Myanmar terus membatasi akses pengamat internasional ke Rakhine (Roberts, 2017).

Diskriminasi sistematis terhadap Rohingya tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor historis, hukum, politik, ekonomi, dan konstruksi sosial identitas.

Faktor Hukum: Undang-Undang Kewarganegaraan 1982

Faktor paling fundamental adalah Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Undang-undang ini secara eksplisit mengklasifikasikan warga negara ke dalam tiga kategori: warga negara penuh (full citizens), warga negara terasosiasi (associate citizens), dan warga negara naturalisasi (naturalized citizens). Untuk menjadi warga negara penuh, seseorang harus dapat membuktikan bahwa leluhurnya telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 (sebelum Perang Inggris-Burma pertama). Karena sebagian besar Rohingya adalah keturunan imigran yang datang pada masa kolonial Inggris (setelah 1824), mereka secara otomatis tidak memenuhi syarat. Akibatnya, secara hukum mereka menjadi "penduduk tak berkewarganegaraan" (stateless) atau "imigran ilegal" meskipun telah tinggal di tanah yang sama selama beberapa generasi (Fink, 2009).

Faktor Politik: Kebijakan Nasionalisme Buddha-Bamar

Setelah kemerdekaan, Myanmar membangun identitas nasional yang sangat terkait dengan etnis Bamar dan agama Buddha. Tujuh pilar Burmese Way to Socialism yang diperkenalkan oleh Ne Win menekankan pada identitas Burma yang homogen. Dalam narasi nasional ini, kelompok-kelompok minoritas terutama Muslim Rohingya diposisikan sebagai "ancaman" terhadap keutuhan bangsa dan budaya. Partai politik Rohingya dilarang, dan perwakilan mereka dalam pemerintahan diabaikan selama beberapa dekade. Otoritarianisme militer memperkuat kebijakan ini melalui kontrol ketat terhadap ruang sipil (Cheung, 2012).

Faktor Ekonomi: Persaingan Sumber Daya di Rakhine

Negara Bagian Rakhine adalah salah satu wilayah termiskin di Myanmar, dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Persaingan atas lahan pertanian, akses ke air bersih, dan pekerjaan menciptakan ketegangan ekonomi antara komunitas Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya. Kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan etnis Rakhine dalam alokasi lahan dan lisensi usaha memperdalam jurang pemisah ini. Setelah krisis

2012, banyak bisnis milik Rohingya dihancurkan atau disita, yang semakin memiskinkan komunitas tersebut (Smith, 2012).

Faktor Identitas dan Konstruksi Sosial

Di tingkat masyarakat, telah terjadi proses "peng-asing-an" (othering) yang panjang terhadap Rohingya. Media nasionalis dan kelompok ultranasionalis Buddha seperti 969 Movement dan Ma Ba Tha (Organisasi Perlindungan Ras dan Agama) secara sistematis mempromosikan narasi bahwa Rohingya adalah "orang Bengali" dari Bangladesh yang datang secara ilegal dan mengancam demografi serta agama Buddha di Rakhine. Narasi ini sangat efektif dalam membangun sentimen anti-Rohingya di kalangan masyarakat Buddha Myanmar secara luas. Penggunaan media sosial, terutama Facebook, menjadi katalis utama dalam penyebaran ujaran kebencian ini (Human Rights Watch, 2017).

Faktor Internasional: Kurangnya Tekanan Konsisten

Untuk waktu yang lama, Myanmar (terutama pada masa transisi demokrasi 2011-2016) mendapat dukungan luas dari negara-negara Barat yang melihat Aung San Suu Kyi sebagai ikon demokrasi. Akibatnya, tekanan internasional terhadap kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya relatif rendah. China dan Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, juga secara konsisten memblokir resolusi yang lebih keras terhadap Myanmar karena kepentingan ekonomi dan geopolitik mereka. Baru setelah krisis 2017 yang sangat brutal, tekanan internasional meningkat secara signifikan (Weatherbee, 2016).

Dampak Regional dan Internasional

Dampak Kemanusiaan

Dampak paling langsung dan tragis adalah penderitaan manusia yang luar biasa. Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya saat ini terkonsentrasi di kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, yang merupakan kamp pengungsi terpadat di dunia. Kondisi di kamp-kamp ini sangat memprihatinkan: kepadatan ekstrem, sanitasi buruk, risiko wabah penyakit (termasuk difteri dan kolera), keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak, serta tingginya tingkat kekerasan berbasis gender. Anak-anak Rohingya tumbuh di pengungsian tanpa akses ke pendidikan formal yang layak, menciptakan risiko "generasi yang hilang" (UNHCR, 2020).

Dampak terhadap Negara-Negara Penerima Pengungsi

Bangladesh sebagai negara penerima utama menghadapi beban yang luar biasa. Selain tekanan pada infrastruktur dan layanan publik, krisis ini juga menimbulkan ketegangan sosial dengan komunitas tuan rumah di Cox's Bazar yang merasa sumber daya mereka tersedot untuk pengungsi. Malaysia dan Indonesia, sebagai tujuan favorit bagi pengungsi Rohingya yang berusaha melarikan diri dari Bangladesh, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan kapasitas domestik yang terbatas. Kedua negara juga menghadapi masalah lalu lintas manusia dan penyelundupan migran melalui jalur laut yang berbahaya. Thailand, yang sering dijadikan negara transit, telah menerapkan kebijakan push-back yang kontroversial, menolak kapal-kapal pengungsi memasuki perairannya (Storey, 2019).

Dampak terhadap Stabilitas Regional ASEAN

Krisis Rohingya telah menjadi ujian terbesar bagi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional. Ketidakmampuan ASEAN untuk memberikan respons yang efektif karena prinsip non-intervensi telah memicu kritik dari komunitas internasional. Kekhawatiran juga muncul bahwa krisis ini dapat menjadi sumber radikalisasi di kawasan, karena beberapa kelompok ekstremis dapat memanfaatkan penderitaan Rohingya untuk merekrut anggota baru. Selain itu, ketegangan antara negara-negara

Muslim (Malaysia, Indonesia, Brunei) dengan Myanmar di forum ASEAN semakin terlihat jelas, mengancam konsensus yang selama ini menjadi fondasi organisasi (Roberts, 2017).

Dampak Internasional

Di level global, krisis Rohingya telah memicu perdebatan sengit tentang Responsibility to Protect (R2P) norma yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan jika negara gagal, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk campur tangan. Kasus Myanmar menjadi contoh di mana R2P gagal diimplementasikan karena adanya veto di Dewan Keamanan PBB. Proses hukum di ICJ dan ICC (International Criminal Court) masih berlangsung, namun prospek akuntabilitas jangka panjang masih belum jelas (UN Human Rights Council, 2018).

Peran ASEAN dalam Konflik Kemanusiaan

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada tahun 1967 dengan prinsip dasar yang salah satunya adalah non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara anggota. Prinsip ini tertuang secara eksplisit dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) tahun 1976 dan kembali ditegaskan dalam Piagam ASEAN tahun 2008. Secara historis, prinsip ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan yang baru saja keluar dari masa konflik Perang Dingin, serta untuk melindungi negara-negara anggota yang masih muda dan rapuh dari intervensi kekuatan eksternal (Weatherbee, 2016). Namun, dalam konteks krisis kemanusiaan seperti yang dialami Rohingya, prinsip non-intervensi menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, prinsip ini menghormati kedaulatan Myanmar sebagai negara anggota. Di sisi lain, prinsip ini membelenggu ASEAN untuk mengambil tindakan berarti ketika Myanmar melakukan pelanggaran HAM yang sistematis terhadap penduduknya sendiri. Ketegangan antara prinsip non-intervensi dan tanggung jawab kemanusiaan tidak pernah terselesaikan secara memuaskan dalam kerangka ASEAN. Berbagai usulan untuk menciptakan mekanisme HAM regional yang lebih kuat, termasuk pembentukan pengadilan HAM ASEAN, selalu gagal karena penolakan dari Myanmar dan beberapa negara anggota lainnya (Kusuma & Wijaya, 2020).

Respons ASEAN terhadap krisis Rohingya dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama (2012-2015) ditandai dengan sikap yang sangat hati-hati. ASEAN hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan umum yang mengungkapkan keprihatinan tetapi tidak pernah secara eksplisit menyebut Myanmar sebagai pihak yang bertanggung jawab. Misalnya, Pernyataan Ketua ASEAN (Chairman's Statement) setelah KTT ASEAN tahun 2013 hanya menyebut "situasi di Negara Bagian Rakhine" tanpa menyebut kata "Rohingya". Ini mencerminkan tekanan dari Myanmar yang menganggap istilah "Rohingya" sebagai kontroversial (Roberts, 2017).

Fase kedua (2016-2017) ditandai dengan meningkatnya tekanan dari negara-negara anggota ASEAN yang mayoritas Muslim, terutama Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Malaysia dan Indonesia mendorong ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Akhirnya, pada Desember 2016, ASEAN untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan yang menyebut "keprihatinan mendalam atas perkembangan di Negara Bagian Rakhine," tetapi tetap tidak menyebut kata "Rohingya". Setelah kekerasan 2017, ASEAN akhirnya menggunakan istilah "komunitas Muslim di Negara Bagian Rakhine" sebagai kompromi diplomatik (Storey, 2019).

Fase ketiga (2018-sekarang) ditandai dengan upaya ASEAN untuk memainkan peran yang lebih aktif melalui mekanisme yang disebut "ASEAN-Centric Approach". Pada April 2017, ASEAN membentuk Tim ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan di Rakhine (ASEAN Humanitarian Assistance Team). Pada tahun 2018, di bawah kepemimpinan Ketua ASEAN dari Singapura, ASEAN menyepakati ASEAN Plan of Action untuk implementasi rekomendasi dari Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan. Namun, implementasi rencana ini di lapangan sangat lambat karena kurangnya akses dan kerja sama dari pemerintah Myanmar (Rahman, 2021).

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)

AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) didirikan pada tahun 2011 sebagai respons terhadap Badai Nargis yang menghancurkan Myanmar pada tahun 2008. Mandat utama AHA Centre adalah untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi bantuan kemanusiaan antar-negara anggota ASEAN, baik untuk bencana alam maupun konflik. Dalam konteks Rohingya, AHA Centre mulai terlibat secara signifikan setelah krisis 2017 (AHA Centre, 2018). Peran AHA Centre meliputi beberapa fungsi. Pertama, sebagai mekanisme information sharing: AHA Centre mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang kebutuhan kemanusiaan di Rakhine dan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh. Kedua, sebagai coordinator bantuan: AHA Centre membantu mengoordinasikan pengiriman bantuan dari negara-negara anggota ASEAN ke Bangladesh dan Rakhine. Ketiga, sebagai operational support: AHA Centre mengerahkan tim penilai kebutuhan (needs assessment team) dan personel teknis ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. Keempat, sebagai capacity builder: AHA Centre melatih staf kemanusiaan nasional di Myanmar dan Bangladesh (Rahman, 2021). Namun, AHA Centre juga memiliki keterbatasan struktural yang signifikan. Pertama, AHA Centre tidak memiliki mandat untuk melakukan advokasi hak asasi manusia atau memberikan tekanan politik terhadap Myanmar. Fungsinya murni teknis-operasional. Kedua, akses AHA Centre ke wilayah Rakhine sangat tergantung pada izin dari pemerintah Myanmar, yang sering kali membatasi pergerakan dan area operasi. Ketiga, AHA Centre tidak memiliki dana operasional yang independen; ia bergantung pada kontribusi sukarela dari negara-negara anggota dan mitra donor. Akibatnya, skala operasi AHA Centre relatif kecil dibandingkan dengan UNHCR atau IOM (Storey, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman secara mendalam mengenai fenomena diplomasi multitrack dalam penanganan krisis Rohingya di Asia Tenggara. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara spesifik peran ASEAN dan organisasi kemanusiaan dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk kerja sama, hambatan, serta efektivitas diplomasi yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Krisis Rohingya di Asia Tenggara

Dinamika krisis Rohingya di Asia Tenggara ditandai oleh beberapa gelombang besar pengungsian yang terjadi secara periodik sejak akhir abad ke-20. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1978 setelah dilaksanakannya Operasi Raja Naga (Operation King Dragon) oleh militer Myanmar. Operasi tersebut menyebabkan sekitar 250.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Selanjutnya, gelombang kedua terjadi pada tahun 1991–1992 ketika sekitar 270.000 Rohingya kembali menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh akibat operasi militer lanjutan. Pada periode ini, sebagian

pengungsi mulai bergerak menuju negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, meskipun jumlahnya masih terbatas karena keterbatasan akses transportasi dan biaya perjalanan (Smith, 2012; UNCU, 1993).

Gelombang pengungsian berikutnya terjadi pasca kekerasan komunal di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2012. Konflik tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah pengungsi ke Bangladesh, tetapi juga mendorong arus migrasi melalui jalur laut menuju Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Situasi mencapai puncaknya pada tahun 2015 ketika terjadi krisis kapal pengungsi di Laut Andaman dan Selat Malaka. Pada Mei 2015, lebih dari 5.000 pengungsi Rohingya dan pencari suaka Bangladesh terlantar di laut setelah ditinggalkan oleh jaringan penyelundup manusia. Thailand, Malaysia, dan Indonesia sempat menerapkan kebijakan push-back dengan menolak kapal pengungsi memasuki wilayah perairan mereka. Namun, tekanan internasional akhirnya mendorong ketiga negara tersebut untuk memberikan izin pendaratan darurat dengan skema bantuan sementara (Storey, 2019; UNHCR, 2015).

Gelombang pengungsian terbesar terjadi setelah operasi militer Myanmar pada Agustus 2017. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan bergabung dengan sekitar 300.000 pengungsi yang telah berada di wilayah tersebut sebelumnya. Kondisi ini menjadikan Cox's Bazar sebagai kamp pengungsi terbesar dan terpadat di dunia dengan jumlah penghuni melebihi satu juta jiwa. Dari Bangladesh, arus pengungsian sekunder terus berlangsung menuju Malaysia dan Indonesia melalui jalur laut yang berbahaya. Data UNHCR (2020) menunjukkan bahwa sepanjang 2019–2020 lebih dari 2.500 Rohingya mendarat di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan sekitar 1.800 lainnya tiba di Malaysia. Banyak pengungsi meninggal di tengah perjalanan akibat kapal tenggelam maupun kekurangan makanan dan air bersih. Pada tahun 2022–2023, gelombang baru kembali terjadi dengan lebih dari 3.000 Rohingya mendarat di Aceh, yang kemudian memunculkan ketegangan dengan masyarakat lokal akibat meningkatnya beban sosial dan ekonomi (Human Rights Watch, 2023).

Pola pengungsian Rohingya menunjukkan beberapa karakteristik utama. Pertama, pengungsian bersifat push-driven, yaitu lebih dipengaruhi oleh faktor pendorong dari Myanmar seperti kekerasan, diskriminasi, dan ketidakpastian masa depan dibandingkan faktor penarik dari negara tujuan. Kedua, jalur migrasi semakin berbahaya akibat meningkatnya pengawasan terhadap jaringan penyelundup manusia sehingga para pengungsi dipaksa menggunakan rute yang lebih terpencil dan kapal yang tidak layak laut. Ketiga, negara-negara Asia Tenggara belum memiliki kerangka hukum regional yang kuat terkait pembagian tanggung jawab pengungsi, sehingga Bangladesh tetap menanggung beban terbesar, sementara Malaysia, Indonesia, dan Thailand lebih banyak berfungsi sebagai negara transit maupun tujuan sekunder (Rahman, 2021; Kusuma & Wijaya, 2020).

Implementasi Multitrack Diplomacy dalam Krisis Rohingya

Multitrack diplomacy tidak hanya menawarkan alat analisis, tetapi juga kerangka operasional untuk merancang intervensi perdamaian yang holistik. Diamond dan McDonald (1996) mengembangkan lebih lanjut konsep awal Diamond dan Marks dengan mengidentifikasi sembilan jalur diplomasi (nine tracks) yang berbeda. Masing-masing jalur memiliki aktor, metode, dan kontribusi unik dalam proses perdamaian. Kesembilan jalur tersebut tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan membentuk sebuah sistem yang saling terkait dan membutuhkan koordinasi untuk mencapai efektivitas maksimal. Berikut adalah penjelasan lengkap masing-masing jalur:

Track 1: Diplomasi Pemerintah (Government Diplomacy)

Jalur ini merupakan diplomasi tradisional yang melibatkan hubungan resmi antar-negara. Aktor utamanya adalah kepala negara, menteri luar negeri, duta besar, dan diplomat profesional. Metode yang digunakan mencakup negosiasi bilateral, perjanjian multilateral, sidang PBB, serta mekanisme diplomatik formal lainnya. Kontribusi utama Track 1 adalah legitimasi hukum dan kapasitas untuk mengikat para pihak dalam kesepakatan yang mengikat secara internasional. Dalam krisis Rohingya, Track 1 mencakup upaya ASEAN melalui pertemuan menteri luar negeri, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta tekanan diplomatik dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan China (Weatherbee, 2016).

Track 2: Diplomasi Non-Pemerintah atau Profesional (Non-Governmental/Professional Diplomacy)

Jalur ini melibatkan akademisi, peneliti, think tanks, pakar resolusi konflik, dan individu-individu berpengaruh yang tidak mewakili pemerintah secara resmi tetapi memiliki akses dan pengaruh terhadap pengambil kebijakan. Track 2 sering disebut sebagai "diplomasi bayangan" karena dapat mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian yang terlalu sensitif untuk dibahas di jalur resmi. Metode yang digunakan meliputi back-channel negotiations, problem-solving workshops, dan dialog informal tingkat tinggi. Dalam konteks Rohingya, Track 2 diwakili oleh lembaga seperti Crisis Management Initiative (CMI), International Crisis Group (ICG), serta inisiatif dialog yang difasilitasi oleh universitas-universitas di Asia Tenggara (Rahman, 2021).

Track 3: Diplomasi Masyarakat Sipil (Citizen/Community Diplomacy)

Jalur ini melibatkan organisasi non-pemerintah (LSM), gerakan akar rumput (grassroots movements), serikat buruh, aktivis hak asasi manusia, serta media. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran publik, memobilisasi tekanan sosial terhadap pemerintah, dan memberikan layanan langsung kepada korban konflik. Metode yang digunakan mencakup kampanye advokasi, petisi, aksi damai, pelaporan pelanggaran HAM, serta program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam krisis Rohingya, Track 3 dijalankan oleh organisasi seperti Human Rights Watch, Amnesty International, serta jaringan LSM lokal di Myanmar, Bangladesh, dan Indonesia (Humanitarian Practice Network, 2019).

Track 4: Diplomasi Bisnis (Business Diplomacy)

Jalur ini melibatkan sektor swasta, perusahaan multinasional, kamar dagang, dan investor. Sektor bisnis memiliki kapasitas untuk memberikan insentif ekonomi bagi perdamaian (misalnya melalui investasi di daerah pasca-konflik) atau, sebaliknya, dapat menjadi sumber pendanaan bagi aktor-aktor konflik jika tidak dikelola dengan baik. Metode yang digunakan meliputi corporate social responsibility (CSR), conflict-sensitive investment, serta tekanan melalui rantai pasok global. Dalam konteks Myanmar, beberapa perusahaan internasional menarik investasi mereka sebagai bentuk tekanan terhadap militer Myanmar pasca-krisis 2017 (Storey, 2019).

Track 5: Diplomasi Pembangunan (Development Diplomacy)

Jalur ini melibatkan lembaga pembangunan bilateral dan multilateral seperti USAID, DFID, UNDP, serta bank pembangunan seperti Asian Development Bank (ADB). Fokusnya adalah pada bantuan pembangunan jangka panjang yang bertujuan mengatasi akar-akar konflik seperti kemiskinan, ketimpangan, dan lemahnya tata kelola. Metode yang digunakan mencakup program pembangunan kapasitas, restorasi infrastruktur, dan peace dividends (keuntungan ekonomi dari perdamaian). Di Rakhine State, berbagai program pembangunan telah dijalankan namun seringkali terhambat oleh

pembatasan akses dan kurangnya kepercayaan dari komunitas Rohingya (UNHCR, 2020).

Track 6: Diplomasi Lintas Agama (Religious/Interfaith Diplomacy)

Jalur ini melibatkan pemimpin agama, organisasi keagamaan, dan forum dialog antar-iman. Dalam banyak konflik yang memiliki dimensi identitas agama (termasuk di Myanmar), jalur ini sangat penting untuk meredakan ketegangan dan membangun rekonsiliasi. Metode yang digunakan mencakup dialog antar-pemimpin agama, mediasi berbasis nilai-nilai spiritual, serta program rekonsiliasi komunitas. Contoh konkret adalah inisiatif yang dilakukan oleh Sangha (komunitas biksu Buddha) moderat di Myanmar bersama dengan ulama Muslim internasional untuk meredakan kebencian berbasis agama (Cheung, 2012).

Track 7: Diplomasi Media (Media Diplomacy)

Jalur ini melibatkan jurnalis, editor, produser media, serta platform media sosial. Media memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk persepsi publik—baik untuk memicu kebencian maupun untuk mempromosikan perdamaian. Metode yang digunakan meliputi pelaporan investigatif, jurnalisme perdamaian (peace journalism), kampanye media sosial, serta pemberitaan yang berimbang. Dalam krisis Rohingya, media sosial (terutama Facebook) justru terbukti menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian terhadap Rohingya, namun juga digunakan oleh aktivis untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM (Human Rights Watch, 2017).

Track 8: Diplomasi Pendidikan dan Pelatihan (Education and Training Diplomacy)

Jalur ini melibatkan pendidik, sekolah, universitas, dan lembaga pelatihan. Fokusnya adalah pada pendidikan perdamaian (peace education) jangka panjang yang mengubah cara pandang generasi muda terhadap konflik dan "musuh". Metode yang digunakan mencakup pengembangan kurikulum perdamaian, pelatihan fasilitator, serta program pertukaran pelajar lintas-konflik. Di wilayah Rakhine, terdapat program pendidikan multikultural yang dirancang untuk mempertemukan anak-anak Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya, meskipun implementasinya sangat terbatas karena segregasi yang parah (Kusuma & Wijaya, 2020).

Track 9: Diplomasi Nilai dan Spiritual (Values/Spiritual Diplomacy)

Jalur ini melibatkan pemikir moral, filsuf, seniman, budayawan, serta tokoh spiritual yang bergerak di ranah nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran, dan martabat manusia. Metode yang digunakan lebih bersifat kultural dan artistik, seperti pertunjukan teater perdamaian, pameran seni, musik, dan sastra. Jalur ini memiliki kemampuan unik untuk menjangkau dimensi emosional dan spiritual dari konflik yang tidak dapat dijangkau oleh jalur-jalur lain. Dalam krisis Rohingya, berbagai dokumenter, film, dan karya sastra telah diproduksi untuk menyuarakan penderitaan Rohingya ke publik global (Diamond & McDonald, 1996).

Diamond dan Marks (1992) menekankan bahwa keberhasilan multitrack diplomacy tidak terletak pada penguasaan satu atau dua jalur saja, melainkan pada kemampuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kesembilan jalur tersebut secara simultan. Dalam praktiknya, jalur-jalur ini sering tumpang tindih dan saling memperkuat. Misalnya, temuan dari Track 2 (akademisi) dapat menjadi dasar advokasi Track 3 (LSM), yang kemudian diliput oleh Track 7 (media), yang pada gilirannya menekan Track 1 (pemerintah) untuk mengambil tindakan.

Analisis Efektivitas Multitrack Diplomacy

Pendekatan *multitrack diplomacy* dalam penanganan krisis Rohingya menunjukkan beberapa keberhasilan penting, terutama karena melibatkan berbagai aktor selain

pemerintah. Keberhasilan pertama terlihat dari kemampuan berbagai organisasi HAM, media internasional, dan lembaga internasional dalam menjaga isu Rohingya tetap menjadi perhatian dunia. Laporan dari Human Rights Watch, Amnesty International, dan PBB mengenai pelanggaran HAM di Myanmar menjadi dasar bagi munculnya tekanan internasional melalui sanksi serta pengajuan kasus Myanmar ke ICJ dan ICC (Human Rights Watch, 2017; UN Human Rights Council, 2018).

Keberhasilan berikutnya terlihat dalam penanganan bantuan kemanusiaan di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh. Kerja sama antara UNHCR, IOM, NGO internasional, serta dukungan sektor swasta berhasil menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan vaksinasi bagi pengungsi Rohingya. Koordinasi multi-aktor tersebut membantu menekan risiko kelaparan dan wabah penyakit di kamp pengungsian (UNHCR, 2020; Rahman, 2021).

Selain itu, *multitrack diplomacy* juga berhasil meningkatkan kesadaran publik di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Kampanye dari organisasi masyarakat sipil, media, dan tokoh agama mendorong munculnya solidaritas masyarakat terhadap pengungsi Rohingya. Tekanan publik tersebut kemudian mempengaruhi pemerintah agar lebih aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap pengungsi (Kusuma & Wijaya, 2020).

Pendekatan ini juga membuka ruang dialog informal antara berbagai pihak melalui *track two diplomacy* dan diplomasi lintas agama. Forum-forum tersebut mempertemukan akademisi, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat untuk membangun komunikasi dan mengurangi ketegangan antarkelompok. Di sisi lain, sektor bisnis turut memberikan tekanan ekonomi terhadap Myanmar melalui penghentian kerja sama oleh beberapa perusahaan internasional setelah krisis 2017 (Storey, 2019).

Hambatan Politik dan Kemanusiaan

Meskipun menunjukkan beberapa keberhasilan, *multitrack diplomacy* masih menghadapi berbagai hambatan politik dan kemanusiaan. Hambatan utama berasal dari prinsip non-intervensi ASEAN yang membatasi tindakan tegas terhadap Myanmar. Perbedaan pandangan antarnegara anggota ASEAN juga menyebabkan sulitnya mencapai kebijakan bersama dalam menangani krisis Rohingya (Weatherbee, 2016).

Hambatan lainnya adalah terbatasnya akses organisasi internasional ke wilayah konflik di Rakhine. Pemerintah Myanmar membatasi masuknya jurnalis, pengamat HAM, dan lembaga kemanusiaan sehingga proses dokumentasi pelanggaran HAM maupun distribusi bantuan menjadi tidak optimal (UN Human Rights Council, 2018). Selain itu, faktor geopolitik global juga mempengaruhi penyelesaian konflik. Dukungan China dan Rusia terhadap Myanmar di Dewan Keamanan PBB membuat berbagai upaya tekanan internasional sering mengalami hambatan (Cheung, 2012).

Dari sisi kemanusiaan, keterbatasan pendanaan menjadi masalah serius dalam pengelolaan kamp pengungsi. Bantuan internasional yang tidak mencukupi berdampak pada berkurangnya layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi pangan bagi pengungsi Rohingya. Kondisi kamp yang padat juga memicu berbagai persoalan keamanan seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan konflik internal antar-pengungsi (IOM, 2019).

Selain itu, proses repatriasi pengungsi Rohingya hingga kini masih mengalami kebuntuan. Myanmar belum memberikan jaminan kewarganegaraan, perlindungan HAM, maupun keamanan bagi Rohingya yang akan kembali ke Rakhine. Akibatnya, sebagian besar pengungsi menolak repatriasi karena khawatir mengalami kekerasan kembali (UNHCR, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Krisis Rohingya di Asia Tenggara merupakan krisis kemanusiaan yang berlangsung secara berkepanjangan akibat kekerasan, diskriminasi, dan ketidakjelasan status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Gelombang pengungsian yang terus terjadi sejak tahun 1978 hingga saat ini menunjukkan bahwa konflik Rohingya tidak hanya menjadi persoalan domestik Myanmar, tetapi telah berkembang menjadi isu regional yang berdampak pada kondisi sosial, politik, dan keamanan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Pendekatan *multitrack diplomacy* menjadi salah satu upaya penting dalam menangani krisis Rohingya karena melibatkan berbagai aktor di luar pemerintah, seperti organisasi internasional, LSM, media, sektor bisnis, akademisi, dan tokoh agama. Implementasi sembilan jalur diplomasi menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan hanya melalui jalur diplomasi formal pemerintah, tetapi membutuhkan kerja sama multidimensi yang saling mendukung. Pendekatan ini berhasil meningkatkan perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di Myanmar, memperkuat bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya, serta mendorong solidaritas publik di berbagai negara.

DAFTAR REFERENSI

- AHA Centre. (2018). AHA Centre annual report 2018: Coordinating humanitarian action in ASEAN. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance.
- Busumtwi-Sam, J. (2002). Development and peacebuilding: Conceptual and operational deficits. *International Journal*, 57(2), 231-248.
- Charney, M. W. (2009). *A history of modern Burma*. Cambridge University Press.
- Cheung, S. (2012). Migration, ethnicity, and the construction of the "other" in Myanmar. *Asian Ethnicity*, 13(1), 45-61.
- Diamond, L., & Marks, J. (1992). *Multitrack diplomacy: A systems approach to peace* (2nd ed.). Institute for Multi-Track Diplomacy.
- Diamond, L., & McDonald, J. W. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace* (3rd ed.). Kumarian Press.
- Dinstein, Y. (2016). *Non-international armed conflicts in international law*. Cambridge University Press.
- Fink, C. (2009). *Living silence: Burma under military rule*. Zed Books.
- Human Rights Watch. (2017). *Burma: New satellite images confirm Rohingya village destruction*. <https://www.hrw.org>
- Humanitarian Practice Network. (2019). *Humanitarian challenges in Rakhine State: Access, protection, and coordination*. Overseas Development Institute.
- Kusuma, B., & Wijaya, A. (2020). Indonesia's humanitarian diplomacy in the Rohingya crisis: Between normative commitment and national interest. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 145-162.
- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Montville, J. V. (2006). Track two diplomacy: The work of healing. In P. G. Roeder & D. Rothbart (Eds.), *Social psychology of intergroup reconciliation* (pp. 15-32). Oxford University Press.
- Paffenholz, T. (2009). *Civil society and peacebuilding*. Centre for Humanitarian Dialogue Discussion Paper, 1(1), 15-25.
- Rahman, M. (2021). The role of AHA Centre in the Rohingya humanitarian response: Coordination and limitations. *Asian Journal of Peacebuilding*, 9(1), 87-106.

- Roberts, C. (2017). ASEAN's Myanmar crisis: Challenges to the protection norm and regional credibility. *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 254-278.
- Smith, M. (2012). *Burma: Insurgency and the politics of ethnicity*. Zed Books.
- Storey, I. (2019). ASEAN and the Rohingya crisis: Implications for regional security and credibility. *Southeast Asian Affairs*, 2019(1), 45-62.
- UN Human Rights Council. (2018). Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar (A/HRC/39/64). United Nations.
- UNCU (United Nations Coordination Unit). (1993). Situation of human rights in Myanmar: Report of the Special Rapporteur. United Nations.
- UNHCR. (2020). Rohingya refugee response: 2020 update and funding requirements. United Nations High Commissioner for Refugees.
- Weatherbee, D. E. (2016). *ASEAN's half century: A political history of the Association of Southeast Asian Nations*. Rowman & Littlefield